

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah hasil dari sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di Amerika Serikat pada 25 September 2015. Sidang ini dihadiri oleh 193 negara, termasuk Indonesia, yang sepakat untuk mendukung pembentukan SDGs.¹ Dalam penerapannya, SDGs mencakup 17 tujuan yang harus dicapai untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. SDGs berfungsi sebagai kerangka kerja dengan jangka waktu 15 tahun, dimulai pada 2015 dan akan berakhir pada 2030

Dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), disepakati 17 tujuan pembangunan global dengan 169 target serta 241 indikator. Tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut meliputi: (1) Penghapusan Kemiskinan; (2) Penghapusan Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Akses Air Bersih dan Sanitasi; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; (10) Pengurangan Ketimpangan; (11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Perlindungan Ekosistem Laut; (15) Perlindungan Ekosistem

¹ Badan Pusat Statistik, (2020) "*Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*," *Kajian Indikator Lintas Sektor*, 2014, 1–162. hlm. 3

Darat; (16) Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Kuat; serta (17) Kemitraan untuk Pencapaian Tujuan.²

Di Indonesia, konteks SDGs diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang mengharuskan setiap daerah untuk mulai mengimplementasikan program SDGs guna mencapai tujuan pada tahun 2030. Perpres ini menetapkan target nasional yang sejalan dengan target global SDGs, termasuk upaya untuk menghapus kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh wilayah pada tahun 2030. Peraturan ini memberikan arahan yang jelas dan terukur untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Menurut Alisjahbana dan Endah, pengukuran kemiskinan tidak hanya didasarkan pada dimensi pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap layanan dasar dan sumber daya produktif lainnya. Beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan kemiskinan meliputi persentase penduduk dibawah garis kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, jumlah penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan, serta akses terhadap perlindungan sosial dan pendidikan.³

Soemardjan menggambarkan berbagai metode pengukuran kemiskinan yang menggunakan standar berbeda, dengan memperhatikan dua kategori utama kemiskinan. Pertama, Kemiskinan Absolut, yaitu kondisi kemiskinan yang terkait dengan tingkat pendapatan dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar

² Sekretariat Nasional SDGs, (2023) “17 Tujuan Untuk Mengubah Indonesia Agenda 2030 Untuk Pembangunan Berkelanjutan,”. <https://sdgs.bappenas.go.id/literasi/>. Diakses pada 16 September 2023 Pukul 16.00 WIB

³ Emil Salim, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi*, Unpad Press, vol. 91, 2018. hlm. 58

minimum, sehingga seseorang dapat menjalani kehidupan yang layak. Dalam hal ini, kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan seseorang dengan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan perumahan layak guna kelangsungan hidup. Kedua, Kemiskinan Relatif, yang dilihat dari sudut pandang ketimpangan sosial. Dalam kategori ini, meskipun seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, tingkat kesejahteraannya masih jauh dibawah masyarakat sekitarnya. Semakin besar jurang antara pendapatan kelompok kaya dan miskin, semakin banyak orang yang dianggap miskin. Oleh karena itu, kemiskinan relatif berkaitan dengan ketimpangan pendapatan.⁴

Pandemi *Covid-19* telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan di seluruh dunia. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2021 jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem bisa bertambah hingga 150 juta orang secara global. Pandemi ini telah mendorong banyak orang semakin terperosok ke dalam kemiskinan ekstrem. Faktanya, isu kemiskinan ekstrem merupakan salah satu masalah global yang tercantum dalam tujuan pertama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu "*no poverty*" atau tanpa kemiskinan. Target ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk kemiskinan, dengan harapan menjadi solusi bagi setiap negara dalam membangun dan menjaga kualitas hidup generasi mendatang di seluruh dunia. Untuk mencapai target ini, setiap negara perlu

⁴ Rusli, H. (2022). "*Sustainable Development Goals dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan*". (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa). <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/24983> hlm. 13

merumuskan strategi yang efektif untuk memberantas segala bentuk kemiskinan agar dapat tercapai pada tahun 2030.

Strategi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem memerlukan kebijakan yang tepat dan terarah. Saat ini, kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah dibagi menjadi dua kelompok utama: kebijakan dan program untuk mengurangi beban pengeluaran, serta kebijakan dan program untuk meningkatkan kapasitas pendapatan. Pemerintah menjalankan berbagai kebijakan dan program untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan, seperti melalui program bantuan sosial, subsidi, jaminan sosial, serta jaring pengaman sosial. Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan dengan kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan pendapatan. Dalam kebijakan peningkatan pendapatan, terdapat empat aspek penting, yaitu pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, akses ke pekerjaan, serta kebijakan terkait penanganan dampak *Covid-19*.⁵ Pada provinsi Sumatera Barat pada tiap kabupaten/kota dalam tingkat kemiskinan mempunyai rekor yang bagus karena didapati berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) turun secara signifikan seperti tabel dibawah.

⁵ TNP2K, (2021) “Ringkasan Kebijakan: Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Indonesia”. 1–8, <https://tnp2k.go.id/download/51020673>. Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia. hlm. 4

Tabel 1.1
Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2020-2022

No	Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen)		
		2020	2021	2022
1	SUMATERA BARAT (Provinsi)	6.28	6.63	5.92
2	Kepulauan Mentawai	14.35	14.84	13.97
3	Pesisir Selatan	7.61	7.92	7.11
4	Kab.Solok	7.81	8.01	7.12
5	Sijunjung	6.78	6.80	6.00
6	Tanah Datar	4.40	4.54	4.26
7	Padang Pariaman	6.95	7.22	6.25
8	Agam	6.75	6.85	6.22
9	Lima Puluh Kota	6.86	7.29	6.59
10	Pasaman	7.16	7.48	6.85
11	Solok Selatan	7.15	7.52	6.51
12	Dharmasraya	6.23	6.67	5.56
13	Pasaman Barat	7.04	7.51	6.93
14	Padang	4.40	4.94	4.26
15	Kota Solok	2.77	3.12	3.02
16	Sawahlunto	2.16	2.38	2.28
17	Padang Panjang	5.24	5.92	5.14
18	Bukittinggi	4.54	5.14	4.46
19	Payakumbuh	5.65	6.16	5.66
20	Pariaman	4.10	4.38	4.13

Sumber: *Sumbar.bps.go.id*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat mengalami penurunan angka kemiskinan meskipun telah melalui masa pandemi *Covid-19*. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi tidak menghalangi semangat masyarakat untuk membangkitkan perekonomian mereka. Di sisi lain, strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah juga berperan penting dalam menurunkan persentase kemiskinan di Sumatera Barat, terutama di Kota Padang Panjang.

Pembahasan mengenai pengentasan kemiskinan pernah disampaikan oleh Rizda Octaviani, M. Sy pada tahun 2020. Rizda menekankan bahwa kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup pelayanan pendidikan, dorongan untuk munculnya wirausaha, serta peningkatan akses pengembangan sumber daya manusia. Dari perspektif ekonomi publik, upaya tersebut secara fungsional bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan (termasuk bantuan kepada anak yatim) dan mengurangi kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perbedaan kepemilikan kekayaan. Lembaga wakaf turut berkontribusi dalam bidang pendidikan dengan menyediakan fasilitas pendidikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.⁶

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmah Fajriwati, Werianto, dan Musbatiq Srivani pada tahun 2022 menyoroti bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada dasarnya merupakan bagian dari liberalisasi ekonomi Indonesia. Gubernur Bank Indonesia, Burhanudin Abdullah, di Jakarta menyampaikan bahwa bank sentral telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 8,25 persen. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui Dana Bergulir. Kota Padang Panjang di Sumatera Barat, yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap usaha kecil untuk memenuhi biaya makan, sandang, dan kebutuhan sehari-hari, menghadapi masalah utama dalam

⁶ Octaviani, R. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Produktif di Kota Padang Panjang. *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics*, 1(01), 36-46. hlm. 1-2

permodalan. Dengan adanya Dana Bergulir, kinerja UMKM di kota Padang Panjang dapat ditingkatkan.⁷

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada penanganan kemiskinan melalui beberapa langkah program pengentasan kemiskinan. Dalam penelitian ini, terdapat unsur kebaruan karena selain membahas penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh para aktor dengan berfokus pada program tertentu, penelitian ini juga menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana inovasi dan kolaborasi dapat meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Muntaha Mardhatillah yang menjelaskan bahwa efektivitas program (UPPKS) pemberdayaan masyarakat miskin di Padang Panjang sudah efektif dengan 70,55% kategori baik. Meskipun pelaksanaan program UPPKS sudah sesuai dengan prosedur yang ada namun belum sepenuhnya mampu memperbaiki kesejahteraan para anggotanya. Hal ini terlihat dengan masih ditemukannya beberapa kendala di dalamnya. Dalam implementasinya, kendala yang dihadapi dapat dikategorikan menjadi dua bentuk internal kendala dan kendala eksternal. Kendala internal seperti lemahnya pengawasan terhadap program, kurangnya modal yang berasal dari pemerintah,

⁷ Srivani, M., Nurdin, E., & Ausri, A. (2022). Pengaruh Dana Bergulir Terhadap Kinerja Umkm di Kota Padang Panjang Sumatera Barat. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(04), 556-559. hlm. 48-49

pembinaan yang tidak merata didistribusikan. Kendala eksternal seperti belum maksimalnya penggunaan dana bantuan, kurang kelompok kreativitas dan inovasi dalam mencari dan memanfaatkan sumber daya keuangan, keterlambatan pembayaran kembali pinjaman. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melibatkan keluarga kesejahteraan berperan sebagai bapak angkat dalam kelompok, bimbingan, dan kendala yang didapat peserta program melakukan upaya seperti pendampingan, melakukan sistem proaktif anggota terjebak dalam pembayaran.⁸

Upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan terus berlanjut, dengan isu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat sebesar 2,04 persen menurut data BPS 2022. Presiden Joko Widodo menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0 persen pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan ini, beliau mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai kemiskinan ekstrem, yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini menginstruksikan 22 Kementerian, 6 Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah intervensi yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

⁸ Mardhatillah, M. (2021). Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(1), 36-50. hlm. 36

Dalam penelitian ini, peneliti berencana untuk fokus pada metode studi kasus yang mendalam guna menganalisis strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks lokal secara lebih mendalam, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan program. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada pemahaman global tentang bagaimana kota-kota kecil dapat mengatasi kemiskinan ekstrem dengan memperhatikan target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal ini didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Padang Panjang telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan dianggap berhasil, terutama setelah terjadinya pandemi *Covid-19*.

1.2 Rumusan Masalah

Kota Padang Panjang menerapkan prinsip-prinsip SDGs dalam melaksanakan pembangunan yang direncanakan melalui RPJMD Kota Padang Panjang. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa tantangan, salah satunya adalah masalah kemiskinan. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 merupakan dokumen yang menjelaskan visi dan misi kepala daerah terkait rencana pembangunan kota untuk periode 2018-2023, berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2018 dan disahkan pada tanggal 8 Oktober 2017.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kota Padang Panjang mengikuti tahapan-tahapan yang ditetapkan sesuai regulasi tersebut. Dalam RPJMD Kota Padang Panjang, terdapat sejumlah aspek yang sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs, salah satunya adalah Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan serta peningkatan daya saing kota. Isu penurunan kemiskinan juga menjadi salah satu fokus utama dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023.

Merujuk pada Peraturan Walikota Padang Panjang No. 58 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 dimana ada rencana untuk aksi program kemiskinan yang selaras dengan tujuan nomor 1 dari 17 tujuan SDGs adalah tanpa kemiskinan, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun atau *end poverty in all it's forms everywhere*. Dalam peraturan tersebut terdapat 4 pilar utama yaitu Penguatan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin, dan Penataan Infrastruktur dan Akses Dasar.⁹

⁹ Peraturan Walikota No 58 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi agenda utama, berbagai sektor seperti infrastruktur, pariwisata, pangan, dan energi turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Selain empat pilar utama, Pemerintah Kota Padang Panjang juga melakukan berbagai inovasi dan kolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan gizi anak. Tujuan PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat dengan menyediakan akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga dalam mengakses layanan tersebut, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta mengenalkan produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.¹⁰

¹⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Gambar 1.1

Kegiatan Bantuan Sosial yang Dilakukan oleh Pemerintah



Sumber: Pemerintah Kota Padang Panjang

Lalu dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem pemerintah Kota Padang Panjang juga mengadakan Program Zakat, Infaq, dan *Shodaqoh* (ZIS) dengan memberikan potensi ZIS untuk membantu keluarga miskin melalui kerjasama dengan Baznas dan lembaga amil zakat.

Gambar 1.2

Penyaluran Bantuan Yatim Piatu (Yapi) di Bank Mandiri



Sumber: Pemerintah Kota Padang Panjang

Program terakhir ialah “Padang Panjang Peduli” dengan bersinergi antar OPD dan elemen masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan sosial dan pemberdayaan.¹¹ Salah satu indikator keberhasilan strategi pengentasan kemiskinan yaitu menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuk termasuk dengan kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan ekstrem adalah sejenis kemiskinan yang didefinisikan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Indikator kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang berpendapatan dibawah US\$1,91 PPP (*purchasing power party*) per kapita per hari (setara Rp9.089/hari). PPP didefinisikan sebagai jumlah unit mata uang yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa yang umum yang dapat dibeli oleh satu unit mata uang umum atau referensi.¹²

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat mencatat bahwa Kota Padang Panjang berhasil menurunkan angka kemiskinan di tahun 2020 menjadi 5,24 persen. Berdasarkan rilis BPS, tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang turun dari 5,60 persen pada tahun 2019 menjadi 5,24 persen di tahun 2020. Selanjutnya menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Angka Kemiskinan Ekstrem di Padang Panjang 0 persen. Data yang sama dilansir Kementerian

¹¹ Yesinta Arora, (2023) “Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang di Bidang Pendidikan Kesehatan Dan Perumahan Dalam Meminimalisir Kemiskinan” (SkripsiUinMahmudYunusBatusangkar)<https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/29137>. hlm. 70-82

¹² Akhmad Fatikhurizqi and Bayu Dwi Kurniawan, “Peran Bantuan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Timur Tahun 2020,” *Seminar Nasional Official Statistics 2022*, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1322>. hlm. 1028

Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam bentuk Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Hal ini menjadikan Kota Padang Panjang sebagai satu-satunya daerah yang persentase kemiskinan ekstremnya berada di angka 0,00 persen di Provinsi Sumatera Barat.¹³

Di tengah isu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah di Indonesia, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, satu-satunya daerah di Sumatera Barat dengan angka kemiskinan nol persen pada 2022 seperti yang bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2022 (dalam ribuan jiwa)

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kepulauan Mentawai	7.254	3.826	2.104
2	Pesisir Selatan	6.143	1.731	2.171
3	Solok	9.256	2.122	2.811
4	Sijunjung	5.033	1.804	5.561
5	Tanah Datar	2.824	2.646	1.867
6	Padang Pariaman	4.740	3.996	1.139
7	Agam	12.364	9.096	0.918
8	Lima Puluh Kota	6.634	4.845	6.412
9	Pasaman	3.775	2.137	0.710
10	Solok Selatan	3.214	3.204	2.770
11	Dharmasraya	4.892	0.429	3.980
12	Pasaman Barat	3.847	6.159	3.588
13	Kota Padang	8.964	4.383	6.338
14	Kota Solok	0.287	0.194	0.672

¹³ Redaksi, (2021) "Angka Kemiskinan Di Padang Panjang Turun Jadi 5,24 Persen Tahun 2020," *Langgam.id*. <https://langgam.id/angka-kemiskinan-di-padang-panjang-turun-jadi-524-persen-tahun-2020/>. Diakses pada 19 September 2023 Pukul 13.15 WIB

15	Kota Sawah Lunto	0.000	0.250	0.525
16	Kota Padang Panjang	0.479	0.572	0.000
17	Kota Bukittinggi	1.418	2.065	1.675
18	Kota Payakumbuh	2.124	1.078	0.148
19	Kota Pariaman	0.685	0.305	0.282

Sumber: www.sumbarprov.go.id

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Kota Padang Panjang merupakan satu-satunya daerah di Sumatera Barat dengan angka kemiskinan nol persen pada tahun 2022. Namun, angka kemiskinan realisasi pada tahun 2022 masih berada di angka 5,14 persen, yang tergolong cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah kota perlu melakukan sejumlah langkah, termasuk evaluasi menyeluruh, melanjutkan program yang ada, merumuskan inovasi baru, serta memperkuat kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak.¹⁴

Pemerintah Kota Padang Panjang telah melaksanakan beberapa program untuk memulihkan perekonomian masyarakat selama pandemi, termasuk program pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikenal sebagai Rumah Wirausaha. Program ini bertujuan mendukung upaya pemerintah kota dalam membimbing para pelaku usaha, guna menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini juga bertujuan agar para pelaku usaha lebih memahami cara memanfaatkan fasilitas kemudahan izin yang diberikan pemerintah, sehingga dapat memperlancar kegiatan usaha dan meningkatkan investasi di Kota Padang Panjang.

¹⁴ Isril, Naidi. (2023) "Angka Kemiskinan Ekstrem Padang Panjang Nol Persen," Antara News. <https://sumbar.antaranews.com/berita/575331/angka-kemiskinan-ekstrem-padang-panjang-nol-persen>. Diakses pada 18 September 2023 Pukul 20.22 WIB.

Melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperdakop UKM) menggelar pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM Tahun 2022. Penyelenggaraan pelatihan bertujuan agar memberikan pemahaman berwirausaha dan membangun jiwa kewirausahaan para pelaku usaha mikro di Kota Padang Panjang. Sektor UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian masyarakat Kota Padang Panjang, Program dan pelatihan yang digagas tersebut sangat mendorong dan selaras dengan sasaran yang ingin dicapai pada RPJMD 2018-2023 Kota Padang Panjang yaitu menurunnya angka kemiskinan.¹⁵

Gambar 1.3

Kegiatan Coaching UMKM Program Rumah Wirausaha



Sumber: berita.padangpanjang.go.id

¹⁵ Tobari, (2022) "40 Pelaku Usaha Di Padang Panjang Mikro Ikuti Pelatihan Kewirausahaan," <https://infopublik.id/kategori/nusantara/613577/40-pelaku-usaha-di-padang-panjang-mikro-ikuti-pelatihan-kewirausahaan>. Diakses pada 28 Januari 2024 Pukul 23.19 WIB.

Lewat program ini pemerintah kota telah melakukan salah satu dari tiga program strategi pengentasan kemiskinan ekstrem yaitu peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat yaitu melalui peningkatan pelatihan keahlian kepada aktor UMKM. Pelatihan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) ini memberikan dukungan penuh kepada pelaku usaha untuk senantiasa berupaya mengembangkan usahanya dan meningkatkan kualitas produksi. Tumbuhnya perekonomian masyarakat bisa dipengaruhi melalui pengembangan UMKM khususnya para pelaku usaha kecil. Melalui program ini, pemerintah kota telah melaksanakan salah satu dari tiga strategi pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan keahlian kepada pelaku UMKM. Pelatihan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) ini bertujuan memberikan dukungan penuh kepada pelaku usaha agar terus mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan kualitas produksi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dipacu melalui pengembangan UMKM, khususnya bagi pelaku usaha kecil.

Gambar 1.4
Kegiatan Sosialisasi UMKM Program Rumah Wirausaha



Sumber: Info Publik Portal Berita Info Publik

Dalam hal ini, pelatihan melalui program Rumah Wirausaha dilaksanakan kepada aktor usaha dengan rata-rata usaha yang dirintis baru berjalan dua tahun. Kegiatan yang diikuti oleh 40 pelaku usaha mikro di Kota Padang Panjang bertujuan pada penajaman pengetahuan kepada sumber daya manusianya. Melalui pelatihan tersebut harapan yang dicapai yaitu para aktor UMKM ini dapat bersaing pada *marketplace* dan *online shop* agar keberlangsungan usahanya bersaing dalam era digitalisasi seperti saat ini.¹⁶

Kemudian Pemerintah Kota Padang Panjang melaksanakan berbagai program bantuan sosial sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Program-program tersebut meliputi bantuan langsung tunai (BLT), subsidi pangan, serta program padat karya yang melibatkan masyarakat kurang mampu untuk menciptakan lapangan kerja sementara. Selain itu, pemerintah juga

¹⁶ *Ibid.*

berfokus pada peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi kelompok rentan.

Penelitian ini berasumsi bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, terutama yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial, efektif dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0%. Selain itu, inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga keagamaan, turut berperan penting dalam keberhasilan tersebut. Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama penyaluran bantuan sosial dianggap memastikan bantuan yang tepat sasaran, sementara prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal lalu juga disesuaikan dengan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan memakai prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan nomor 1 yaitu menghilangkan segala bentuk kemiskinan di manapun berada terutama setelah terjadinya pandemi Covid-19 dan menjadi kota dengan 0% angka kemiskinan ekstrem. Berdasarkan hal ini, maka pertanyaan utama yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Pemerintah Kota Padang Panjang Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2018-2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dihasilkan berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan strategi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan mengacu pada tujuan dan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian yang sudah disebutkan di atas. Maka hasil penelitian yang sedang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Berikut penjelasannya

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan terkait peranan pemerintah daerah dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta dapat memberikan sumbangan yang besar bagi disiplin ilmu politik dan pengembangan program ide terkait keterlibatan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- b. Secara praktis, sebagai bahan rujukan serta pertimbangan bagi pelaksana kebijakan dan organisasi dalam mewujudkan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pemerintahan kota maupun daerah.